

KATA PENGANTAR

Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis BPPKB tahun 2013-2018.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun sampai dengan Triwulan 1 Tahun Anggaran 2015, maka peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran akan menjadi jelas dan terukur sebagaimana rencana kerja yang telah ditetapkan .

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang memuat kebijakan dan program / kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. SulSel tahun anggaran 2016, dan untuk merieviuw hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja .

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam melengkapi dan menyelesaikan rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA PROV. SULSEL

Hj. ANDI MURLINA PA, S. Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580602 197812 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Strategis.....	8
(Capaian pada tahun n-2, n-1, tahun rencana, dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)	
2.3. Identifikasi Masalah.....	29
(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi, dalam bersinergi dengan Kab/Kota, dalam pencapaian Visi Misi RPJMD)	
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
3.1 Arah dan Kebijakan Renstra.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja.....	31
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	33
(rumusan usulan program/kegiatan prioritas)	
3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan.....	35
(untuk setiap kegiatan pada Tahun Rencana)	
BAB IV PENUTUP.....	43

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPPKB mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016. Ini merupakan tahun kedua periode Renstra BPPKB 2013-2018 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan rancangan Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. SulSel “ Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas” dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, BPPKB Provinsi SulSel menyusun Rencana Kerja Tahun 2016. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran RPJMD Periode 2013-2018. Renja SKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Renja ini menguraikan lebih rinci tentang kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum BPPKB Prov. SulSel dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi SulSel Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2266/XII/Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
16. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulawesi Selatan No. 050/117/XII/ Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2015, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPKB Prov. SulSel tahun 2016.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2016.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Strategis
(Capaian pada tahun n-2, n-1, tahun rencana, dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)
- 2.3. Identifikasi Masalah
(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi, dalam bersinergi dengan Kab/Kota, dalam pencapaian Visi Misi RPJMD)

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Arah dan Kebijakan Renstra
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas
(rumusan usulan program/kegiatan prioritas)
- 3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan
(untuk setiap kegiatan pada Tahun Rencana)

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2014 (n-2) yang mengacu pada Renstra BPPKB Tahun 2013 – 2018, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapainya, sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Mewujudkan keserasian kebijakan dan penatalaksanaan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada seluruh sektor di Sulawesi Selatan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan pengarus utamaan gender pada SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota
 - b. Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan perempuan dan anak di provinsi dan kab/kota
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengelolaan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Sulawesi Selatan. dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapsitas sumberdaya aparatur dalam implementasi PUG di provinsi dan kab/kota
 - b. Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
 - c. Meningkatnya kualitas manajemen program dan keuangan, ketersediaan sumberdaya aparatur, serta sarana dan prasarana yang memadai
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak
 - b. Mengurangi kesenjangan gender di lembaga pemerintah, parlemen, dan ketenagakerjaan
4. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya cakupan kepesertaan KB
 - b. Menurunnya jml keluarga pra sejahtera
 - c. Meningkatnya jumlah kelompok bina keluarga binaan
 - d. Meningkatnya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan anak yang berperspektif gender

Penetapan sasaran-sasaran tersebut di atas merupakan sasaran-sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun sehingga menjadi sasaran tahunan yang pada dasarnya indikator masing-masing outcome pada kegiatan merupakan sasaran tahunan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Strategi

Evaluasi pelaksanaan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategi, untuk setiap tahun anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Kinerja Tahun 2014 (n-2)

Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja BPPKB tahun 2014 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2014 berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan perempuan dan anak di provinsi dan kab/kota			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kab/kota layak anak	3 Kab/Kota	Pembinaan Kab/Kota Layak Anak	252,370,000
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan pengarus utamaan gender pada SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
	Jumlah Kebijakan Teknis PUG di Prov. dan Kab/Kota	10 Kebijakan prov. & 4 kab/kota	1. Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	76,700,000
	Jumlah SKPD Prov & Kab/Kota yg mengimplemen asikan Prasyarat PUG	35 SKPD Prov. & 6 Kab/Kota (Bone, Sinjai, Luwu, Bantaeng & Pinrang)	2 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan PUG	278,000,000
	Jumlah Perencana SKPD Prov. dan Kab/Kota yg memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG/ARG	70 org di provinsi dan 140 Orang di Kab/kota	3. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yg Responsive Gender	242,000,000

	Jumlah SKPD Prov. dan Kab/Kota yg menyusun data terpilah /profil gender dan anak	10 SKPD Prov. dan 5 Kab/Kota	4. Workshop Penyusunan Data Gender dan Anak	185,800,000
Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	
	Persentase Kab/Kota yg menerapkan SPM terpadu Bid.layanan Perlindungan perempuan dan Anak	29% Kab/kota	1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	332,950,000
Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.	
	Jumlah Kab/Kota yg mengintegrasikan hak partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemb.	8 (delapan) Kab/Kota	1. Penguatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.	281,800,000
			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
	Jumlah Fasilitator terlatih untuk tumbuh kembang anak	120 orang di 3 kab/kota	1. Pelatihan calon fasilitator Tumbuh Kembang Anak	126,290,000

			Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU	
	Jumlah Kader PAUD terlatih untuk integrasi pengasuh anak usia dini secara holistik -	100 orang di 4 Kab/Kota	1. Pembinaan dan Penguatan Kader Bina Balita	114,400,000
Mengurangi kesenjangan gender di lembaga pemerintah, parlemen, dan ketenagakerjaan			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
	Jumlah Perempuan di Lembaga Politik yang memperoleh penguatan kapasitas sehingga meningkatkan kemampuannya dibidang politik.-	150 orang	1. Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan	105,000,000
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan/regulasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	3 Kab/kota	2. Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan.-	129,100,000
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB			Program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	
	Jumlah kader terlatih sebagai petugas lini lapangan KB di Kab/Kota	200 kader yg tersebar di 4 Kec/ 4 Kab/Kota	1. Pelatihan Petugas Lini Lapangan KB	229,525,000
	Jumlah Peserta KB baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil .	400 orang di 4 Kab/Kota	2. Pelayanan Peserta KB Baru di daerah tertinggal dan terpencil	94,350,000

	Tersedia laporan hasil evaluasi program KB di SulSel untuk bahan masukan perencanaan program KB	1 (satu) Laporan	3. Evaluasi Program KB bagi Pengelola KB Kab/Kota	141,415,000
Menurunnya jml keluarga pra sejahtera			Program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	
	Jumlah Kelompok ekonomi perempuan yg terbentuk dan terbina	25 kelompok di 3 Kab/Kota	1. Pemberdayaan ekonomi Keluarga	215,800,000
	Jumlah Kelompok Remaja Putus Sekolah yg terbina	25 kelompok di 3 Kab/Kota	2. Pemberdayaan remaja putus sekolah	157,000,000
	Jumlah kab/kota yg terfasilitasi dan dibina untuk penguatan dan pengelolaan P2WKSS dan GSI	25 % (6 Kab/Kota)	3. Pembinaan Peningk.Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan GSI	263,800,000
Meningkatnya jumlah kelompok bina keluarga binaan			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
	Jumlah Fasilitator Kespro Remaja Luar Sekolah	100 orang di 2 kab/kota	1. Pelatihan calon fasilitator kespro remaja	156,810,000
	Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah yg terbentuk	30 Kelompok di 3 Kab/Kota	2. Pembentukan Kelompok KRR Luar Sekolah	94,400,000
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlin ngan Perempuan dan Anak	
	Jumlah Kab/Kota yg membentuk Bina Keluarga TKI	5 Pokja di 5 Kab/Kota	1. Pengembangan kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)	149,480,000
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok LANSIA	3 Kelompok di 3 Kab/Kota	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok LANSIA	150,000,000	

	Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok Penyandang Disabilitas	3 Kelompok di 3 Kab/Kota	2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Penyandang Disabilitas -	150,000,000
Meningkatnya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan anak yang berperspektif gender			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
	Jumlah Jenis data dan informasi yg terpublikasi	45 Jenis / Buletin 200 Eksplr	1. Publikasi Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan KS	117,710,000
Meningkatnya kualitas manajemen program, dan keuangan, serta ketersediaan sumber, daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai			Program Pengadaan Administrasi Perkantoran	
	Persentase layanan kebutuhan ATK untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100%	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	18,876,000
	Persentase layanan kebutuhan cetak & penggandaan untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100%	2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000
	Persentase layanan kebutuhan untuk koordinasi dalam dan luar daerah terpenuhi	100%	3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	406,224,000
	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan tahun 2014	69%	Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,680,000

Persentase pemeliharaan sarana & prasarana kantor tahun 2014 sesuai kebutuhan	100%	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,334,000
Persentase kebutuhan pakaian dinas aparat BPPKB terpe nuhi dalam rangka tertib pemakaian pakaian dinas & pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	3. Pengadaan Pakaian Dinas & Pakaian Khusus lainnya	33,500,000
		4. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	36,000,000
Partisipasi Aparatur BPPKB dalam diklat	80%	5. Pendidikan dan Pelatihan Formal	100,800,000
Jumlah Jenis layanan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi kinerja BPPKB	3 Jenis layanan	6. Pengelolaan perpustakaan, dokumen dan informasi	111,086,000
Persentase Penyelesaian /Pengelolaan SPJ Keu	100%	7. Pengelolaan Keuangan BPPKB	266,800,000
Jumlah Ketersediaan Stand Pameran BPPKB 2014	1 (Satu) Lokasi/Ruang	8. Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Prov. SulSel	56,600,000
		Program Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	7 (Tujuh) dokumen	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	29,152,000

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja BPPKB Th.2013	3 Dokumen	2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB	38,000,000
	Jumlah Kab/Kota yg memenuhi beberapa indika tor pelaksanaan PUG dan PUHA .	6 Kab/Kota sbg Nominator	3. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB prov. SulSel	150,000,000
	Penetapan bersama terkait target kinerja pem bangunan PP,PA,KB dan KS di SulSel tahun 2015	1 Dokumen	4. Konsolidasi Program Pembangunan PP dan KB	176,248,000

Selanjutnya , berikut ini akan diuraikan sejauh mana keberhasilan kinerja BPPKB tahun 2014, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing sasaran strategis, yang disajikan melalui formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :

FORMULIR HASIL CAPAIAN TARGET PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	HASIL CAPAIAN	PERSEN
2	3	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan perempuan dan anak di provinsi dan kab/kota	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kab/kota layak anak	3	3	100
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan pengarus utamaan gender pada SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah Kebijakan Teknis PUG di Prov. dan Kab/Kota	10	10	100
	Jumlah SKPD Prov & Kab/Kota yg mengimplemen- asikan Prasyarat PUG	35	35	100
	Jumlah Perencana SKPD Prov. dan Kab/Kota yg memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG/ARG	70	70	100
	Jumlah SKPD Prov. dan Kab/Kota yg menyusun data terpilah /profil gender dan anak	15	15	100
Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Persentase Kab/Kota yg menerapkan Sistem terpadu Layanan ktA /ktP	34	34	100

Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak	Jumlah Kab/Kota yg mengintegrasikan hak partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemb	8	8	100
	Jumlah Fasilitator terlatih untuk tumbuh kembang anak	120	120	100
	Jumlah Kader PAUD terlatih untuk integrasi pengasuhan anak usia dini secara holistik .	100	100	100
Mengurangi kesenjangan gender di lembaga pemerintah, parlemen, dan ketenagakerjaan	Jumlah Perempuan di Lembaga Politik yang memperoleh penguatan kapasitas sehingga meningkatkan kemampuannya dibidang politik kapasitasnya	150	150	100
	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang ditingkatkan Kapasitasnya	120	120	100
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB	Jumlah kader terlatih sebagai petugas lini lapangan KB di Kab/Kota	200	200	100
	Jumlah Peserta KB baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil .	400	400	100

	Tersedia laporan hasil evaluasi program KB di SulSel untuk bahan masukan perencanaan program KB	1	1	100
Menurunnya jml keluarga pra sejahtera	Jumlah Kelompok ekonomi perempuan yg terbentuk dan terbina	25	25	100
	Jumlah Kelompok Remaja Putus Sekolah yg terbina	25	25	100
	Persentase Kab/Kota yg memenuhi kriteria pengelolaan P2WKSS dan GSI	25%	25%	100
Meningkatnya jumlah kelompok bina keluarga binaan	Jumlah Fasilitator Kespro Remaja Luar Sekolah	100	100	100
	Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah yg terbentuk	30	30	100
	Jumlah Kab/Kota yg membentuk Bina Keluarga TKI	5	5	100
	Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok LANSIA	3	3	100
	Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok Disabilitas	3	3	100
Meningkatnya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan anak yang berperspektif gender	Jumlah Jenis data dan informasi yg terpublikasi	45	45	100

Meningkatnya kualitas manajemen program, dan keuangan, serta ketersediaan sumber, daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai	Persentase layanan kebutuhan ATK untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100	100	100
	Persentase layanan kebutuhan cetak & penggandaan untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100	100	100
	Persentase layanan kebutuhan untuk koordinasi dalam dan luar daerah terpenuhi	100	100	100
	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan tahun 2014	69	69	100
	Persentase pemeliharaan sarana & prasarana kantor tahun 2014 sesuai kebutuhan	90	90	100
	Persentase kebutuhan pakaian dinas aparat BPPKB terpenuhi dalam rangka tertib pemakaian pakaian dinas & pakaian khusus hari-hari tertentu	100	100	100
	Partisipasi Aparatur BPPKB dalam diklat	80	80	100
Jumlah Jenis layanan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi kinerja BPPKB	3	3	100	
Persentase Penyelesaian /Pengelolaan SPJ Keu	100	100	100	

Jumlah Ketersediaan Stand Pameran BPPKB 2014	1	1	100
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	7	7	100
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja BPPKB Th.2013	3	3	100
Jumlah Kab/Kota yg memenuhi beberapa indikator pelaksanaan PUG dan PUHA	6	6	100
Penetapan bersama terkait target kinerja pembangunan PP,PA,KB dan KS di SulSel tahun 2015	1	1	100

3.1.1 Kinerja 2015 (n-1)

Kinerja tahun 2015 sebagai tahun kedua dari implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2013-2018, sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015, belum dapat dievaluasi secara menyeluruh disebabkan kegiatan sementara dalam tahap pelaksanaan, namun berikut ini akan disajikan hasil penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam pernyataan penetapan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 sebagai target kinerja dari sasaran strategis, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan perempuan dan anak di provinsi dan kab/kota			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan	
			Kualitas Anak dan Perempuan	
	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kab/kota layak anak	3 Kab/Kota	1. Pembinaan Kab/Kota Layak Anak	262,720,000,-
Meningkatnya ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan pengarus utamaan gender pada SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan	
			Kualitas Anak dan Perempuan	
	Jumlah Kebijakan Teknis PUG di Prov. dan Kab/Kota dan Ranperda PUG	11 Kebijakan prov. & 4 kab/kota	1. Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	356,572,500
	Jumlah SKPD Prov & Kab/Kota yg mengimplemen asikan Prasyarat PUG	30 SKPD Prov. & 5 Kab/Kota	2 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan PUG	228,925,000
	Jumlah Perencana SKPD Prov. dan Kab/Kota yg memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG/ARG	40 SKPD Prov, & 120 SKPD di 3 Kab/Kota	3. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yg Responsive Gender	174,702,000
Jumlah SKPD Prov. dan Kab/Kota yg menyusun data terpilah /profil gender dan anak	10 SKPD Prov. dan 5 Kab/Kota	4. Workshop Penyusunan Data Gender dan Anak	186,150,000	

Meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Jumlah Kab/Kota yg menerapkan SPM terpadu Bid.layanan Perlindungan perempuan dan Anak	12 Kab/Kota	1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	401,973,000
Meningkatnya kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Jumlah Kab/Kota yg mengintegrasikan hak partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemb.	6 (Enam) Kab/Kota	1. Penguatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan	411,855,000
			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
	Jumlah Fasilitator terlatih untuk tumbuh kembang anak	200 orang di 4 Kab/Kota	1. Pelatihan calon fasilitator Tumbuh Kembang anak	139,800,000
	Jumlah Kader PAUD terlatih untuk integrasi pengasuhan anak usia dini secara holistik	150 orang di 3 Kab/Kota	Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU 1. Pembinaan dan Penguatan Kader Bina Balita	94,500,000
Mengurangi kesenjangan gender di lembaga pemerintah, parlemen, dan ketenagakerjaan			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	
	Jumlah Perempuan di Lembaga Politik yang memperoleh penguatan kapasitas sehingga meningkatkan kemampuannya dibidang politik	105 orang	1. Penguatan kapasitas kelembagaan perempuan	117,700,500

	Jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan/regulasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan	120 orang di 3 Kab/Kota	2. Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan	120,950,000
Meningkatnya cakupan kepesertaan KB			Program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	
	Jumlah kader terlatih sebagai petugas lini lapangan KB di Kab/Kota	200 kader yg tersebar di 4 Kab/Kota	1. Pelatihan Petugas Lini Lapangan KB	166,850,000
	Jumlah Peserta KB baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil .	400 orang di 4 Kab/Kota	2. Pelayanan Peserta KB Baru di daerah tertinggal dan terpencil	87,900,000
	Tersedia laporan hasil evaluasi program KB di SulSel untuk bahan masukan perencanaan program KB	1 (satu) Laporan	3. Evaluasi Program KB bagi Pengelola KB Kab/Kota	56,700,000
Menurunnya jml keluarga pra sejahtera			Program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera	
	Jumlah Kelompok ekonomi perempuan yg terbentuk dan terbina	20 kelompok di 2 Kab/Kota	1. Pemberdayaan ekonomi Keluarga	146,800,000
	Jumlah Kelompok Remaja Putus Sekolah yg terbina	20 kelompok di 2 Kab/Kota	2. Pemberdayaan remaja putus sekolah	107,100,000
	Persentase Kab/Kota yg memenuhi kriteria pengelolaan P2WKSS dan GSI	10 Kab/Kota	3. Pembinaan Peningk.Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan GSI	229,500,000

Meningkatnya jumlah kelompok bina keluarga binaan			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
	Jumlah Fasilitator Kespro Remaja Luar Sekolah	150 orang di 3 kab/kota	1. Pelatihan calon fasilitator kespro remaja	166,375,000
	Jumlah Kelompok Kesehatan Reproduksi Remaja Luar Sekolah yg terbentuk	30 Kelompok di 3 Kab/Kota	2. Pembentukan Kelompok KRR Luar Sekolah	115,500,000
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlin ngan Perempuan dan Anak -	
	Jumlah Kab/Kota yg difasilitasi dalam pembentukan dan dan pembinaan Bina Keluarga TKI	5 Pokja di 5 Kab/Kota	1. Pengembangan kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)	108,452,000
			Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	
Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok LANSIA	4 Kelompok di 4Kab/Kota	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok LANSIA	165,200,000	
Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok Disabilitas	3 Kelompok di 3 Kab/Kota	2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Penyandang Disabilitas	92,175,000	
Meningkatnya advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan anak yang berperspektif gender			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	
	Jumlah Jenis data dan informasi yg terpublikasi	5 Jenis Bidang data dan Informasi	Publikasi Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan KS	261,600,000

Meningkatnya kualitas manajemen program, dan keuangan, serta ketersediaan sumber, daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai			Program Pengadaan Administrasi Perkantoran	
	Persentase layanan kebutuhan ATK untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100%	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor	18,869,000
	Persentase layanan kebutuhan cetak & penggandaan untuk mendukung kinerja administrasi umum terpenuhi	100%	2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,500,000
	Persentase layanan kebutuhan untuk koordinasi dalam dan luar daerah terpenuhi	100%	3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	289,600,000
			Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD	
	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan tahun 2015	78%	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169,173,000
	Persentase pemeliharaan sarana & prasarana kantor tahun 2015 sesuai kebutuhan	90%	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195,768,000
	Persentase kebutuhan pakaian dinas aparat BPPKB terpenuhi dalam rangka tertib pemakaian pakaian dinas & pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	3. Pengadaan Pakaian Dinas & Pakaian Khusus lainnya	35,175,000
	100%	4. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	29,025,000	

Partisipasi Aparatur BPPKB dalam diklat	60%	5. Pendidikan dan Pelatihan Formal	143,000,000
Jumlah Jenis layanan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi kinerja BPPKB	3 Jenis Sistem Informasi	6. Pengelolaan perpustakaan, dokumen dan informasi	143,550,000
Persentase Penyelesaian /Pengelolaan SPJ Keu	100%	7. Pengelolaan Keuangan BPPKB	214,831,860
Jumlah Ketersediaan Stand Pameran BPPKB 2015	1 (Satu) Lokasi/Ruang	8. Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Prov. SulSel	67,900,000
		Program Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	4 (Empat) dokumen	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	53,210,280
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja BPPKB Th.2015 tor pelaksanaan PUG dan PUHA	4 (empat) Dokumen	2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB	26,400,000
Jumlah Kab/Kota yg memenuhi beberapa indika-	6 Kab/Kota sbg Nominator	3. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB prov. SulSel	141,500,000
Penetapan bersama terkait target kinerja pem bangunan PP,PA,KB dan KS di SulSel tahun 2015	1 Dokumen	4. Konsolidasi Program Pembangunan PP dan KB	78,325,000

3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dari tahun ke tahun, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, maka masalah / hambatan dan kendala masih yang dihadapi adalah :

1. Bidang Pengarusutamaan Gender

- a. Belum semua SKPD provinsi dan kab/kota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender . Hal ini terbukti dari 60 SKPD yang ada, baru 20 SKPD yang mempunyai Focal Point PUG .
- b. Rendahnya komitmen penyelenggara Pemerintahan di Kab/Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kab/Kota. Hal ini terbukti dari 24 kab/Kota yang telah membentuk pokja PUG, namun sebagian besar tidak berfungsi maksimal.
- c. Rendahnya ketrampilan teknis PPRG aparat perencana SKPD provinsi dan kab/kota
- d. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG di SKPD provinsi dan kab/kota
- e. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.

2. Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

- a. Belum tersedia sistem dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan
- b. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan sistem
- c. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relatif kurang dibandingkan aspek penanganan kasus.
- d. Fungsi layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten/kota belum maksimal.
- e. Upaya pemberdayaan perempuan, utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.

3. Bidang Keluarga Berencana

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh KB di kab/kota
- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam berKB

- c. Banyaknya kasus-kasus kesehatan reproduksi di masyarakat
- d. Masih tingginya jumlah pernikahan dini di Sulawesi Selatan

4. Bidang Keluarga Sejahtera

- a. Upaya penurunan jumlah keluarga pra sejahtera belum terintegrasi secara teknis dalam kerangka penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- b. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Sejahtera, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dll), belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor.

Beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi hal yang tetap mendapat perhatian dan penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun kegiatan tahun 2016, khususnya terkait tugas pokok dan fungsi BPPKB Prov. Sulsel, sehingga pencapaian Visi dan Misi secara bertahap dapat dicapai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

1.1. Arah dan Kebijakan Perencanaan Strategis

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, secara khusus Misi (2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan dan Misi (7) Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih, BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018 . Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan ini memuat visi, misi, arah dan kebijakan serta tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan periode ke-3 Tahun 2015-2016 ditetapkan dsengan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pengarusutamaan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi yang harmoni, pembinaan teknis operasional, dan fasilitasi kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
3. Meningkatkan peran serta, kemitraan dan keterpaduan peran stakeholders dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, serta pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak.

1.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

Adapun tujuan dan sasaran pokok Rencana kerja Tahun 2014 tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis tahun 2013-2018 BPPKB Prov. SulSel, sebagai berikut :

Tujuan 1:

Mewujudkan keserasian kebijakan dan penatalaksanaan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada seluruh sektor di Sulawesi Selatan

Sasaran 1 :

1. Meningkatkan ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan pengarus utamaan gender pada SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota
2. Meningkatkan ketersediaan kebijakan dan penatalaksanaan dibidang pengasuhan dan tumbuh kembang anak, serta perlindungan perempuan dan anak di provinsi dan kab/kota

Tujuan 2 :

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring kerja dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender , pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pengelolaan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Sulawesi Selatan

Sasaran 2:

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapsitas sumberdaya aparatur dalam implementasi PUG di provinsi dan kab/kota
2. Meningkatkan cakupan penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
3. Meningkatkan kualitas manajemen program dan keuangan, ketersediaan sumberdaya aparatur, serta sarana dan prasarana yang memadai

Tujuan 3 :

Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak

Sasaran 3 :

1. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan anak
2. Mengurangi kesenjangan gender di lembaga pemerintah, parlemen, dan ketenagakerjaan

Tujuan 4 :

Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga

Sasaran 4 :

1. Meningkatkan cakupan kepesertaan KB
2. Menurunnya jml keluarga pra sejahtera
3. Meningkatkan jumlah kelompok bina keluarga binaan
4. Meningkatkan advokasi dan KIE pemberdayaan perempuan dan keluarga, serta perlindungan anak yang berperspektif gender

Tujuan 5

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih

Sasaran 5

Meningkatnya kualitas manajemen program, dan keuangan, serta ketersediaan sumber, daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai

1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan kegiatan :

1. Pembinaan Kab/Kota Layak Anak
2. Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
3. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan PUG
4. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender
5. Workshop Penyusunan Data Gender dan Anak

B. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak , dengan kegiatan :

1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Penguatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
3. Pengembangan Kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)

C. Program Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan
2. Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan

D. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan kegiatan :

1. Pelatihan Petugas Lini Lapangan KB
2. Pelayanan Peserta KB Baru di daerah tertinggal dan terpencil
3. Evaluasi Program KB bagi Pengelola KB Kab/Kota
4. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
5. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
6. Pembinaan Peningk.Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan GSI.

- E. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan kegiatan :**
1. Pelatihan Calon Fasilitator Kespro Remaja
 2. Pembentukan Kelompok KRR Luar Sekolah
- F. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, dengan kegiatan :**
1. Pelatihan Calon Fasilitator Tumbuh Kembang Anak.
 2. Publikasi Informasi Pemberdayaan Perempuan.
- G. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok LANSIA
 2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Penyandang Disabilitas
- H. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD**
1. Pembinaan dan Penguatan Kader Bina Balita
- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :**
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah
- J. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan kegiatan :**
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Pengadaan Pakaian Dinas, Korpri, dan Pakaian Kerja Lapangan beserta Kelengkapannya.
 4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
 5. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 6. Pengelolaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi.
 7. Pengelolaan Keuangan BPPKB.
 8. Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Prov. Sulawesi Selatan
- P. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :**
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB
 3. Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB di SulSel
 4. Konsolidasi Program Pembangunan PP dan KB

1.4. Indikator Sasaran Target

Untuk rencana program dan kegiatan tahun 2016 , maka telah disepakati bersama indikator sasaran dan target capainnya sebagaimana tertuang dalam table rumuasan program dan kegiatan dan prakiraan maju tahun 2017, sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016**

Urusan/SKPD/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja (Tahunan)	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				1.105.680.000,-				1.205.800.000,-
Pembinaan Kab/Kota Layak Anak	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan pada 20 indikator pendukung penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam mencapai kab/kota	Prov/Kab/Kota	4 kab/kota	275.000.000,-	APBD		5 kab/kota	350.000.000,-
Pengembangan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah kebijakan teknis PUG di prov. dan kab/kota	Prov/Kab/Kota	12 kebijakan prov. dan 12 kab/kota	124.880.000,-	APBD		12 kebijakan prov. dan 12 kab/kota	150.000.000,-
Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan PUG	Jumlah SKPD prov. dan kab/kota yang mengimplemenasikan prasyarat PUG	Prov/Kab/Kota	44 SKPD Prov. dan 5 kab/kota	278.000.000,-	APBD		51 SKPD Prov. dan 4 kab/kota	278.000.000,-
Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender	Jumlah perencanaan SKPD prov. dan kab/kota yang memiliki keterampilan dalam menyusun PPRG/ARG	Prov/Kab/Kota	44 SKPD Prov. dan 6 kab/kota	242.000.000,-	APBD		51 SKPD Prov. dan 4 kab/kota	242.000.000,-
Workshop Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah SKPD prov. dan kab/kota yang menyusun data terpilah/profil gender dan anak	Prov/Kab/Kota	12 SKPD Prov. dan 5 Kab/Kota	185.800.000,-	APBD		12 SKPD Prov. dan 5 Kab/Kota	185.800.000,-

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				879.620.000,-				979.620.000,-
Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Kab/Kota yg mengembangkan Sistem Terpadu data dan informasi serta pelayanan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prov/Kab/Kota	16 Kab/Kota	350.000.000,-	APBD		20 Kab/Kota	450.000.000,-
Penguatan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan hak partisipasi anak dalam perencanaan dan pelaksanaan pemb.	Prov/Kab/Kota	6 kab/kota	379.620.000,-	APBD		4 kab/kota	379.620.000,-
Pengembangan Kelembagaan Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI)	Jumlah kab/kota yang membentuk BK-TKI	Prov/Kab/Kota	5 pokja di 5 kab/kota	150.000.000,-	APBD		6 pokja di 5 kab/kota	150.000.000,-
Program Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan				275.000.000,-				400.000.000,-
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan	Jumlah perempuan di lembaga politik yang memperoleh penguatan kapasitas sehingga meningkatkan kemampuannya dibidang politik	Prov/Kab/Kota	250 orang di 5 kab/kota	125.000.000,-	APBD		300 orang di 6 kab/kota	250.000.000,-

Penguatan Kapasitas Angkatan Kerja Perempuan	1. Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan/regulasi peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan 2. Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yg ditingkatkan kapasitasnya	Prov/Kab/Kota	5 kab/kota 250 Orang	150.000.000,-	APBD		6 kab/kota 300 Orang	150.000.000,-
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				1.282.675.000,-				1.432.675.000,-
Pelatihan Petugas Lini Lapangan KB	Jumlah kader terlatih sebagai petugas lini lapangan KB di Kab/Kota	Prov/Kab/Kota	400 kader yg tersebar di 80 Kec/ 6 kab/kota	229.525.000,-	APBD		400 kader yg tersebar di 80 Kec/ 6 kab/kota	229.525.000,-
Pelayanan Peserta KB Baru Di Daerah Tertinggal dan Terpencil	Jumlah Peserta KB baru yg dilayani di daerah tertinggal dan terpencil	Prov/Kab/Kota	500 orang di 5 Kab/Kota	200.000.000,-	APBD		500 orang di 5 Kab/Kota	200.000.000,-
Evaluasi Program KB Bagi Pengelola KB Kab/Kota	Tersedia laporan hasil evaluasi program KB di SulSel untuk bahan masukan perencanaan program KB	Prov/Kab/Kota	24 Kab/kota	250.000.000,-	APBD		24 Kab/kota	300.000.000,-
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok ekonomi perempuan yang terbentuk dan terbina	Prov/Kab/Kota	40 kelompok di 5 kab/kota	200.000.000,-	APBD		40 kelompok di 5 kab/kota	300.000.000,-
Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Jumlah kelompok remaja putus sekolah yang terbina	Prov/Kab/Kota	40 kelompok di 5 kab/kota	278.150.000,-	APBD		40 kelompok di 5 kab/kota	278.150.000,-

Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan GSI	1. Persentase kab/kota yang memenuhi kriteria pengelolaan P2WKSS dan GSI 2. Jumlah Kab/Kota yg dibina untuk penguatan Pengelolaan P2WKSS/GSI	Prov/Kab/Kota	25 % (10 kab/kota) 10 Kab/Kota	125.000.000,-	APBD		25 % (10 kab/kota) 10 Kab/Kota	125.000.000,-
Program Kesehatan Reproduksi Remaja				251.210.000,-				350.000.000,-
Pelatihan Calon Fasilitator Kespro Remaja	Jumlah fasilitator kespro remaja luar sekolah	Prov/Kab/Kota	200 orang di 4 kab/kota	156.810.000,-	APBD		200 orang di 4 kab/kota	200.000.000,-
Pembentukan Kelompok KRR Luar Sekolah	Jumlah kelompok kesehatan reproduksi remaja luar sekolah yang terbentuk	Prov/Kab/Kota	30 kelompok di 3 kab/kota	94.400.000,-	APBD		40 kelompok di 4 kab/kota	150.000.000,-
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak				350.000.000,-				400.000.000,-
Pelatihan Calon Fasilitator Tumbuh Kembang Anak	Jumlah fasilitator terlatih untuk tumbuh kembang anak	Prov/Kab/Kota	200 orang di 4 kab/kota	150.000.000,-	APBD		250 orang di 5 kab/kota	150.000.000,-
Publikasi Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB dan KS	Jumlah jenis data dan informasi yang terpublikasi	Prov/Kab/Kota	5 jenis data dan informasi	200.000.000,-	APBD		5 jenis data dan informasi	250.000.000,-
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				350.000.000,-				350.000.000,-

Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Lansia	Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok Lansia	Prov/Kab/Kota	4 kelompok di 4 kab/kota	175.000.000,-	APBD		4 kelompok di 4 kab/kota	175.000.000,-
Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Penyandang Disabilitas	Jumlah pembentukan dan penguatan kelompok disabilitas	Prov/Kab/Kota	3 kelompok di 3 kab/kota	175.000.000,-	APBD		3 kelompok di 3 kab/kota	175.000.000,-
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU				150.000.000,-				150.000.000,-
Pembinaan dan Penguatan Kader Bina Balita	Jumlah kader PAUD terlatih untuk integrasi pengasuhan anak usia dini secara holistik	Prov/Kab/Kota	200 orang di 20 Kec /4 kab/kota	150.000.000,-	APBD		300 orang di 30 Kec /6 kab/kota	150.000.000,-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				577.000.000,-				692.000.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase layanan kebutuhan ATK untuk mendukung kinerja administrasi terpenuhi	Prov.	100%	30.000.000,-	APBD		100%	31.000.000,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan kebutuhan cetak dan penggandaan untuk mendukung kinerja administrasi terpenuhi	Prov.	100%	27.000.000,-	APBD		100%	26.000.000,-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Persentase layanan kebutuhan untuk koordinasi dalam dan luar daerah terpenuhi	Dalam dan Luar daerah	100%	520.000.000,-	APBD		100%	635.000.000,-

Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD				1.311.634.000,-				1.597.150.000,-
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sampai dengan tahun 2016	Prov.	69%	350.000.000,-	APBD		69%	450.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan sarana & prasarana kantor tahun 2016 sesuai kebutuhan	Prov.	100%	278.734.000,-	APBD		100%	300.000.000,-
Pengadaan Pakaian Dinas, Korpri, dan Pakaian Kerja Lapangan Beserta Kelengkapannya	Persentase kebutuhan pakaian dinas aparat BPPKB terpenuhi dalam rangka tertib pemakaian pakaian dinas & pakaian khusus hari-hari tertentu	Prov.	100%	35.000,000,-	APBD		100%	50.000,000,-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	pakaian khusus hari-hari tertentu	Prov.	100%	40,000,000	APBD		100%	45,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Partisipasi aparatur BPPKB dalam diklat	Prov.	80 %	150.000.000,-	APBD		80 %	200.000.000,-
Pengelolaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi	Jumlah jenis layanan system informasi, dokumentasi dan publikasi kinerja BPPKB	Prov.	3 jenis layanan	137.150.000,-	APBD		3 jenis layanan	137.150.000,-
Pengelolaan Keuangan BPPKB	Persentase penyelesaian/pengelolaan SPJ keuangan	Prov.	100%	266.800.000,-	APBD		100%	350.000.000,-
Partisipasi Pameran Pembangunan Tingkat Prov. Sulsel	Jumlah ketersediaan stand pameran BPPKB 2016	Prov	1 (satu) lokasi/ruang	53.950.000,-	APBD		1 (satu) lokasi/ruang	65.000.000,-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				396.050.000,-				411.898.000,-
Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Prov.	7 (tujuh) dokumen	29.152.000,-	APBD		7 (tujuh) dokumen	45.000.000,-
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPKB	Jumlah laporan evaluasi kinerja BPPKB tahun 2016	Prov.	3 (tiga) dokumen	38.000.000,-	APBD		3 (tiga) dokumen	38.000.000,-
Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB di SulSel	Jumlah kab/kota yang memenuhi beberapa indikator pelaksanaan PUG dan PUHA	Prov/Kab/Kota	6 kab/kota sebagai nominator	161.850.000,-	APBD		6 kab/kota sebagai nominator	161.850.000,-
Konsolidasi Program Pembangunan PP dan KB	Jumlah Rumusan Kesepakatan keg pembangunan PP, PA, KB & KS	Prov/Kab/Kota	4 Bid. Kegiatan Pembangunan	167.048.000,-	APBD		4 Bid. Kegiatan Pembangunan	167.048.000,-

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan mengacu kepada rancangan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Selatan serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terfokus, rinci dan bertahap sesuai skala prioritas.

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban memberikan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2016.
2. Para Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2016.
3. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang membantu secara teknis Kepala Bidang/Sekretaris dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2016.
4. Staf membantu Kepala Sub Bagian /Sub Bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

1.2. Penutup

Rencana Kerja (Renja) BPPKB Tahun 2016 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan rancangan Renstra BPPKB Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan , serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016.

Rencana Kerja BPPKB sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan rutin dan pembangunan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2016, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja BPPKB Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi BPPKB diharapkan akan lebih akuntabel dan terukur.

9 16 17 22 23 29 36 43